

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 18 Agustus 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Provinsi Jawa Barat	
	Pendapatan Menurun, Apa yang Harus Diserap?	<i>Pikiran Rakyat/ Hal. 10</i>
B	Kota Sukabumi	
	Pemkot Siapkan Bantuan Tak Terduga Rp 1,3 M	<i>Tribun Jabar/Hal. 4</i>

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pendapatan Menurun, Apa yang Harus Diserap?

Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/ Hal. 10

Edisi : Selasa, 18 Agustus 2020

SITUASI ekonomi yang sulit saat ini berdampak terhadap pendapatan daerah, penyokong pembangunan di daerah. Hingga akhir Juli 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru menyerap tak lebih dari 30% anggaran belanja. Tingkat penyerapan yang rendah itu disebut-sebut sebagai salah satu musabab terjadinya kontraksi ekonomi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat Nanin Hayani Adam mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran pada tahun ini bukan karena ada kendala pada lelang atau pembayaran lelang di akhir pekerjaan.

"Sekarang itu, pendapatan kita, laju pertumbuhannya rendah, tidak seperti tahun kemarin. Jadi, pembayaran-pembayaran pekerjaan itu dipilih yang sangat prioritas, yang lainnya dipilih sesuai dengan antrean. Jadi, mungkin saja fisiknya sudah bagus persentasenya, tapi penyerapan anggarannya masih rendah karena posisi kas umum daerah kita tidak seperti tahun-tahun kemarin," ujarnya melalui telepon, Jumat (7/8/2020).

Tak hanya pendapatan yang menurun, *refocusing* anggaran juga memengaruhi kondisi keuangan daerah saat ini. Tahun ini, belanja tidak terduga (BTT) cukup besar sehingga hampir semua belanja lainnya dikurangi.

"Karena laju pertumbuhan pendapatan melambat, kita harus membuat manajemen kas yang baru. Penyerapan ada kalau uangnya ada, pasti *cepat*. Tapi, karena uangnya tidak seperti tahun kemarin, jadi

manajemen kasnya harus disesuaikan," katanya.

Setakat ini, Nanin mengaku belum bisa memerinci realisasi pendapatan ataupun organisasi perangkat daerah dengan tingkat penyerapan paling tinggi dan rendah. Kalaupun sudah diperinci, menurut dia, bukan berarti yang rendah penyerapannya kinerjanya tidak optimal, melainkan kondisi pendapatan saat ini.

"Pendapatan kita menurun, trans-

fer pusat lambat. Ini *kan* ekonomi *sampe* -5, itu *kan* berpengaruh. Kami minta doanya agar pandemi segera berakhir agar ekonomi bangkit kembali," ucapnya.

Diakui dia, saat ini, sudah ada penagihan-penagihan. Dengan keterbatasan kas daerah, pihaknya membuat skala prioritas atau dengan menggunakan sistem antrean. Nanin menyatakan, pendapatan daerah menjadi satu-satunya solusi. Akan tetapi, karena saat ini kondisi ekonomi melambat, itu berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

"Namun, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari pajak daerah melalui program *tripel untung* yang pada dasarnya memberikan keringanan terhadap wajib pajak dan juga memberikan diskon kepada wajib pajak yang membayar kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo. Selain itu, menyosialisasikan program tabungan pajak untuk ASN," ucapnya.

Untuk diketahui, penganggaran APBD dan APBN berbeda. Anggaran

(Bersambung ke hal. 10 kol. 1)

Pendapatan Menurun,

Apa yang Harus Diserap?

Pendapatan Menurun

(Sambungan dari hal. 1 kol. 5)

belanja pada APBD merupakan prognosis, yakni pembiayaan pembangunan tergantung pendapatan tahun berjalan. Sementara APBN, anggaran belanja beriringan dengan ketersediaan pendapatan yang sudah ada.

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan postur belanja sebesar Rp 45,9 triliun dan pendapatan sebesar Rp 41,5 triliun. Dari anggaran belanja tersebut, terdapat belanja langsung sebesar Rp 11,8 triliun untuk belanja modal serta modal belanja barang dan jasa.

Gubernur Ridwan Kamil mendorong jajarannya untuk memaksimalkan penyerapan belanja rutin, seperti keperluan rapat, perjalanan dinas, dan lainnya yang diharapkan bisa memantik pertumbuhan ekonomi di Jabar.

Keselamatan

Akademisi dari Universitas Padjadjaran Yayan

Satyakti mengemukakan, turun drastisnya perekonomian pada kuartal II telah terprediksi sebelumnya. Alasannya, produksi dan konsumsi turun karena *health policy* yang diterapkan, yakni pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada saat pandemi.

Pada periode tersebut, data menunjukkan *performance* periode Covid-19 untuk daerah yang sangat tergantung mobilitas tenaga kerja akan sangat terpengaruh, seperti Jawa Barat dengan kawasan Industri.

Ia menjelaskan, dengan pembatasan mobilitas, sektor yang bersifat *real output* akan memberikan penurunan secara signifikan. Sementara, sektor *output* yang mengandalkan ekspor tidak bisa bergerak karena tidak ada permintaan dari luar negeri, khususnya untuk barang-barang konsumsi riil, kecuali konsumsi utama. Di sisi lain, sektor informal tidak bisa menampung karena pasar ditutup dan tidak

bisa pergi ke mana pun.

"Namun, juga perlu diingat, bagi sektor informal, karena telah beberapa lama tidak bisa keluar rumah untuk kerja, BLT telat, virus masih tidak terkendali, tidak sedikit yang menilai lebih baik terkena virus daripada tidak bisa membiayai rumah tangga. Jadi, sebetulnya, kita sudah kena dua kali dampak," katanya melalui telepon, Jumat (7/8/2020).

Melihat anjloknya perekonomian saat ini, Yayan mengatakan, momentumnya bukan lagi mengendalikan kesehatan melalui PSBB atau *the containment policy*. Akan tetapi, melalui pengendalian protokol kesehatan yang super keras sebagai basis jaminan untuk mobilitas.

"Jika kita bandingkan pertumbuhan kuartal yang negatif, Indonesia masih agak mending dibandingkan dengan Amerika Serikat, Cina, atau Uni Eropa, karena ditunjang oleh konsumsi yang kuat. Tetapi, ketahanan konsumsi ini harus diimbangi dengan *sustainable income*, artinya ketika orang mau belanja, pendapatannya ada,"

ujarnya.

Mengenai negatifnya berbagai indikator perekonomian saat ini dibandingkan dengan kondisi normal, Yayan menuturkan, hal itu terjadi karena kita dalam situasi krisis. Meskipun demikian, ia menekankan, ada peluang di sana bahwa kondisi pada saat ini masih bisa ditangani dengan baik. "Kuncinya, ya melepas mobilitas manusia versus *safety*. Itu tidak bisa ditolak," tuturnya.

Dengan berbagai kondisi yang terjadi saat ini, Yayan mengemukakan, yang harus jadi perhatian pemerintah adalah sektor formal, khususnya pekerja industri manufaktur. *Recalling* pekerja menjadi krusial.

Hanya, ia menekankan, *recalling* tidak bisa berjalan jika permintaan pasar terbatas. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan permintaan. Melalui berbagai cara, permintaan harus dialihkan ke pasar domestik.

"Stop semua impor, geser ke domestik, apa pun itu. Selain itu, pemerintah harus menegosiasi antarindustri agar menggarap pasar do-

mestik secara serius. Untuk *sustainability*, relaksasi kredit segera lakukan dan mengikat dengan baik agar sektor perbankan diberi kepastian, subsidi kredit kalau bisa," katanya.

Secara paralel, ia menambahkan, untuk sektor informal, BLT tetap diberikan karena masih diperlukan. Kemudian, sektor pembiayaan harus mengikat sektor perbankan agar melakukan insentif pembiayaan dengan baik, relaksasi dan penurunan tingkat suku bunga.

"Untuk pemerintah, khususnya pemerintah daerah, BUMD diharapkan bangkit dan sama-sama dengan UMKM menggandeng kantong-kantong UKM untuk menyerap tenaga kerja. Pertahankan konsumsi," katanya.

Lebih lanjut Yayan menekankan, dalam kondisi saat ini, sektor pengeluaran pemerintah menjadi sangat krusial untuk menahan daya beli. Menurut dia, dalam kontrak yang terjadi karena sektor produktivitas relatif telat untuk menopang konsumsi karena pemerin-

telat memberikan relaksasi kebijakan di sektor ekonomi riil, misalnya pembiayaan dan tidak menjaga momentum secara optimal.

"Banyak kebijakan, tetapi telat implementasinya. Anggaran tidak terserap. Dalam satu bulan ini, seharusnya pemerintah atau pemerintah daerah mengeksekusi kebijakan pembiayaan dan kebijakan konsumsi, baik BLT maupun sejenis itu, agar menciptakan produktivitas, penciptaan tenaga kerja, dan menahan konsumsi. Sekarang itu, prinsipnya cepat, cepat, dan cepat, tidak ada lain. Jangan sampai birokrasi ini jadi bumerang dalam mendorong pertumbuhan," ucapnya.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir juga minta pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dalam rangka menjaga perekonomian nasional. Dengan penyerapan anggaran yang baik, menurut Erick, akan dapat menghindari risiko resesi ekonomi.

Erick mengakui tidak mu-

dah untuk mendorong perekonomian tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Namun, dengan pelaksanaan program-program yang telah dikeluarkan, seperti insentif bagi pekerja dan UMKM agar produktif diharapkan perekonomian nasional kembali membaik.

Ia menyampaikan, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta mencapai hingga Rp 33 triliun. Sementara itu, untuk UMKM sebesar Rp 28,8 triliun. Belum lagi program dari Kementerian Desa.

Erick mengharapkan anggaran sebesar Rp 100 triliun pada Agustus-September dapat terserap karena itu merupakan salah satu faktor mesin pendorong perekonomian nasional. Menurut Erick, semua pihak harus berani melakukan penyerapan anggaran karena ini benar-benar untuk rakyat. Apalagi, sekarang mendapat dukungan penuh dari BPKP, BPK, KPK, dan LKPP. (Novianty Nurulliah, Yulistyne Kasumaningrum/-"PR")***

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pemkot Siapkan Bantuan Tak Terduga Rp 1,3 M
Entitas / Cakupan	: Kota Sukabumi
Sumber / Hal	: Tribun Jabar/Hal. 4
Edisi	: Selasa, 18 Agustus 2020



FAUZI NOVIANDI

DIDIN SYARIFUDIN

Pemkot Siapkan Bantuan Tak Terduga Rp 1,3 M

SUKABUMI, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi belum mengucurkan dana pemulihan (*recovery*) sebesar Rp 1,3 miliar untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskoperindag) Kota Sukabumi, Didin Syarifudin, menjelaskan, dana *recovery* itu direncanakan untuk buruh yang dirumahkan dan pedagang pasar yang terdampak Covid-19.

"Anggarannya sudah disediakan melalui bantuan tidak terduga (BTT) APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 1,3 miliar," kata Didin saat dihubungi *Tribun*, Jumat, (7/8).

Anggaran tersebut belum dikeluarkan karena masih dilakukan pendataan terhadap sejumlah UMKM yang terdampak Covid-19 yang bergerak di berbagai bidang.

Menurut Didin, dalam pemulihan UMKM tidak semua akan diberikan uang untuk membantu permodalan, tapi bentuknya ada pembinaan atau bimbingan kepada UMKM.

"Nanti kami lakukan analisa terlebih dahulu sampai titik terendah. Permasalahan UMKM itu apakah dari segi modal, pendistribusian, marketnya ada atau tidak ada. Untuk pendampingan sendiri nanti akan berkerja sama dengan UMKM Jabar Juara, ABCGM, dan lainnya," katanya. (fauzi noviandi)